

RINGKASAN

**Anggi Abela
Pulungan
220510019**

**Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penjualan
Barang Bukti Sitaan Narkotika Oleh Oknum Kepolisian
(Studi Kasus: Perbandingan Putusan Nomor
317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan Putusan Nomor
329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb)
(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H, Fitria Mardhatillah,
M.H.)**

Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa hakim harus menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan pertimbangan hukum yang objektif, sedangkan aparat kepolisian wajib mengelola barang bukti sitaan narkotika sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb ditemukan keterlibatan oknum kepolisian dalam penjualan barang bukti sitaan narkotika serta adanya perbedaan putusan terhadap perkara yang serupa. Kondisi tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Penjualan barang bukti sitaan narkotika oleh oknum kepolisian dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sanksi administratif berdasarkan ketentuan kode etik kepolisian. Penelitian ini juga menemukan adanya disparitas pada putusan hakim yang dipengaruhi oleh perbedaan pertimbangan hakim terhadap fakta persidangan, peran terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Aparat kepolisian disarankan dapat meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan barang bukti sitaan narkotika guna mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh oknum anggota kepolisian. Hakim juga diharapkan mempertimbangkan perkara yang serupa secara lebih konsisten sehingga perbedaan putusan yang dijatuhkan memiliki dasar pertimbangan yang jelas serta dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Disparitas, putusan hakim, Penjualan Barang Bukti, Narkotika.*

SUMMARY

Anggi Abela Pulungan 220510019 ***Disparities in Judicial Decisions in Cases of the Sale of Confiscated Narcotics Evidence by Police Officers (Case Study: Comparison of Decisions Number 317/Pid.Sus/2021/PN Tjb and Decision Number 329/Pid.Sus/2021/PN Tjb)***
(Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H, Fitria Mardhatillah, M.H)

Statutory regulations mandate that judges render verdicts based on trial facts, admissible evidence, and objective legal reasoning, while police officers are required to manage seized narcotics evidence in accordance with applicable rules. However, Court Decisions No. 317/Pid.Sus/2021/PN.Tjb and No. 329/Pid.Sus/2021/PN.Tjb revealed the involvement of police officers in the sale of seized narcotics evidence, as well as inconsistent rulings in similar cases. These circumstances form the basis of this study, which analyzes the relevant legal framework and the factors contributing to judicial sentencing disparities.

This study employs a qualitative research method with a normative-juridical approach, utilizing both statutory and case-based approaches. It is descriptive-analytical in nature, drawing upon primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed using qualitative analysis methods.

The sale of seized narcotics evidence by police officers can result in criminal sanctions under Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, as well as administrative sanctions under the police code of ethics. The study also identified sentencing disparities driven by differing judicial considerations regarding trial facts, the defendant's role, and aggravating or mitigating circumstances. These differences demonstrate a lack of uniformity in sentencing for cases sharing similar characteristics.

It is recommended that police authorities enhance supervision over the management of seized narcotics evidence to prevent misuse by individual officers. Judges are also encouraged to consider similar cases more consistently, ensuring that sentencing differences are grounded in clear reasoning and serve the interests of justice, legal certainty, and legal utility.

Keywords: Disparity, Judicial Decisions, Sales of Evidence, Narcotics.